

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2020: 9). Perkembangan tersebut tidak terlepas di berbagai daerah di Indonesia. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, merupakan hasil pemecahan Provinsi Sumatera di Tahun 1950. Sampai pada 1998, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 10 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini ada pemekaran daerah dan telah terbentuk 17 kabupaten dan 4 kota. Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu kota tujuan di tanah air. Hal ini dikarenakan kondisi kota Palembang yang dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang begitu pesat, terlihat dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat. Saat ini, kota Palembang telah berstatus sebagai kota yang metropolis. Indikator pencapaian kategori metropolis ini ditinjau dari segi kepadatan penduduk, tingkat perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia serta variabel-variabel penunjang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode tertentu. Di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan berbagai jenis transfer dana kepada pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum

(DAU), serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada setiap daerah berdasarkan rumusan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pemerataan keuangan antar-daerah. Tujuan utama DAU adalah membantu daerah dalam membiayai kebutuhan umum dan memberikan ruang fiskal untuk berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, DAU memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah (Sukirno, 2020: 9). PAD menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah dan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi sumber daya lokal. Tingginya PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir (2019-2023), pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir semua sektor ekonomi. Mengingat pentingnya Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan daerah, perlu dilakukan penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Berikut ini data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Selatan 2019 -2023

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2019	1.743.742.960,00	3.494.510.853,25
2020	1.568.602.615,00	3.375.100.984,84
2021	1.563.041.287,00	3.865.463.033,09
2022	1.563.041.287,00	4.930.955.849,52
2023	1.507.104.250,00	5.202.956.071,30

Sumber : <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU1IzI=/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>

Berdasarkan data pada tabel 1.1, diketahui jika data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 hingga 2023 dapat diperoleh melalui publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum, DAU merupakan komponen transfer ke daerah yang diberikan sebagai dana penyeimbang guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tahun-tahun awal periode ini menunjukkan peningkatan nilai DAU, terutama pada 2020 dan 2021, sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Pada 2022 hingga 2023, alokasi cenderung stabil mengikuti kebijakan nasional mengenai penyesuaian fiskal dan realokasi anggaran untuk

pemulihan ekonomi pasca pandemi. Anda dapat merujuk ke laporan tahunan dari DJPK dan publikasi BPS terkait statistik keuangan provinsi untuk detail spesifik per tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah dan dampak pandemi COVID-19. Berikut adalah data ringkas yang dapat diuraikan dari laporan pemerintah: Tahun 2019: Pada tahun ini, target PAD Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi dengan sumber utama berasal dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya. Angka realisasi PAD mencapai sekitar Rp3.494.510.853,25. Tahun 2020: Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan pada pendapatan daerah. Banyak sektor yang mengalami kontraksi sehingga realisasi PAD juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp. 3.375.100.984,84. Tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Pada tahun ini, realisasi PAD mencapai sekitar Rp4,93 triliun dari target yang lebih tinggi, menunjukkan capaian sekitar 91,56%. Hal ini menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum mencapai target sepenuhnya.

Tahun 2022: Pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil mendorong PAD yang terealisasi sebesar Rp4,93 triliun, dengan kontribusi yang lebih besar dari sektor pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Meski demikian, angka ini masih berada di bawah target awal pemerintah yang diproyeksikan mencapai Rp5,38 triliun. Tahun 2023: Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pajak dan peningkatan

kualitas layanan publik, meskipun data spesifik realisasi tahun 2023 belum sepenuhnya dirilis hingga laporan terbaru. Secara umum, tantangan utama dalam mencapai target PAD di Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor eksternal seperti pandemi serta fluktuasi ekonomi global yang mempengaruhi sektor-sektor utama seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi lokal.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Apakah Ada Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023 baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pembangunan perencanaan daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang tentang pembangunan daerah untuk mahasiswa/i Universitas Baturaja.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan inspirasi dalam penelitian selanjutnya dengan pengembangan yang lebih mendalam pada aspek analisis, rentang periode maupun variabel penelitian yang digunakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi Praktisi menjadi salah satu sumber informasi bagi praktisi dan pelaku pemerintah daerah sehingga dapat dipraktekkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai perencanaan Pembangunan daerah.